

Determinan Kinerja Keuangan Daerah dan Implikasinya terhadap Dimensi Keberlanjutan: Bukti Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Hanifah Fara¹, Pancawati Hardiningsih²

^{1,2}Universitas Stikubank Semarang, Indonesia

E-mail: hanifahfara7006@mhs.unisbank.ac.id¹, pancawati@edu.unisbank.ac.id²

Article History:

Received: 09 Juli 2026

Revised: 23 Agustus 2026

Accepted: 17 September 2026

Keywords:

Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian, Efektivitas PAD, Rasio Belanja Modal, Dimensi Sustainability

Abstract: Kinerja keuangan daerah merupakan capaian hasil kinerja organisasi dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini memiliki pembaharuan dari penelitian terdahulu yaitu dengan mengkaitkan kinerja keuangan daerah dan dimensi keberlanjutan (sustainability). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio kemandirian, efektivitas PAD, dan rasio belanja modal terhadap kinerja keuangan dan analisis dampak kinerja keuangan terhadap dimensi keberlanjutan (sosial, ekonomi, dan lingkungan). Metode penelitian kuantitatif menggunakan 105 sampel pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2022 – 2024. Analisis deskriptif komparatif untuk melihat keterkaitan kinerja keuangan dengan dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan melalui perbandingan antara daerah dengan kinerja efisien dan kurang efisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian dan efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan, sedangkan rasio belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil analisis deskriptif komparatif menunjukkan bahwa daerah dengan kinerja keuangan efisien memiliki dampak lebih baik pada dimensi sosial, sedangkan untuk dimensi lingkungan justru daerah yang berkinerja keuangan yang kurang efisien memiliki capaian yang lebih baik. Dimensi ekonomi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara daerah yang efisien dan kurang efisien.

PENDAHULUAN

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melahirkan prinsip otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri dalam lingkup NKRI. Apabila pemerintah daerah dapat melaksanakan otonomi daerah dengan baik kesejahteraan akan meningkat, pelayanan publik lebih

cepat dan pembangunan akan lebih merata. Indikator untuk mengetahui pemerintah daerah tersebut mampu melaksanakan otonomi daerah yaitu dengan melihat kinerja keuangan daerahnya. Kinerja keuangan daerah menurut Sugiharti & Retnani (2019) merupakan capaian hasil kerja suatu organisasi di pemerintah daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Untuk menganalisis kinerja keuangan daerah dilakukan dengan cara melihat rasio keuangan melalui perhitungan angka pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mengalami permasalahan berupa kesenjangan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) antar daerah serta kecenderungan alokasi belanja yang lebih dominan pada belanja operasional daripada belanja modal untuk investasi jangka panjang. Berdasarkan data BPS dalam Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah 2023 dan 2024, rata – rata capaian PAD berkisar antara 11,75% - 60,43% dimana sebanyak 22 pemerintah kabupaten/kota termasuk ke dalam desentralisasi fiskal kurang atau daerah tersebut sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah yang bergantung pada dana transfer pusat memiliki keterbatasan dalam menggunakan anggarannya, akibatnya kemampuan daerah dalam membiayai program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat menjadi menurun. Selain itu, dari sisi alokasi belanja daerah rasio belanja operasional pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berkisar antara 66,18% - 91,51% sedangkan rasio belanja modal hanya berkisar antara 6,21% hingga 21,80%. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas belanja dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Fenomena kesenjangan PAD dan ketimpangan struktur belanja di atas menegaskan perlunya analisis kinerja keuangan daerah yang lebih mendalam. Dalam kerangka tersebut, tiga rasio utama menjadi relevan untuk dikaji yaitu rasio kemandirian, efektivitas PAD, dan rasio belanja modal. Peneliti terdahulu telah mengkaji pengaruh ketiga rasio tersebut namun hasilnya masih menunjukkan inkonsistensi sehingga menunjukkan mengindikasikan adanya celah penelitian (*research gap*), terkait rasio kemandirian, Shafira et al. (2020) menemukan pengaruh positif signifikan, sementara Choiruddin et al. (2023) justru menemukan hubungan negatif. Untuk efektivitas PAD, Choiruddin et al. (2023) menunjukkan pengaruh positif signifikan, sedangkan Pramono et al. (2025) menemukan hubungan negatif signifikan Adapun terkait rasio belanja modal, penelitian Pramono et al. (2025) menunjukkan pengaruh signifikan positif belanja modal terhadap kinerja keuangan, sedangkan Mulia & Widiatmoko (2025) menemukan hubungan signifikan negatif.

Selain itu, penelitian terdahulu sebagian besar masih berfokus pada pengukuran kinerja keuangan melalui rasio keuangan saja tanpa mengaitkan dengan dimensi keberlanjutan (*sustainability*). *Sustainability* menurut (Gürses et al., 2021) merupakan konsep yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab agar dapat terjaga dalam jangka panjang. Dalam konteks pemerintahan daerah, *sustainability* relevan untuk dibahas karena pemerintah tidak hanya bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan yang efisien, tetapi juga terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Indikator *sustainability* diukur melalui kerangka *Sustainable Development Goals (SDGs)*. SDGs merupakan tujuan global yang disepakati oleh PBB dan negara anggota untuk membangun masa depan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. SDGs diterapkan di Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mencakup 17 tujuan dan 169 target. Dalam penelitian ini, SDGs digunakan sebagai kerangka konseptual untuk merepresentasikan tiga dimensi

pembangunan berkelanjutan yaitu dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dikembangkan sebagai pembaharuan dari penelitian terdahulu dan sebagai kajian lebih lanjut mengenai kinerja keuangan daerah dengan dampak terhadap dimensi keberlanjutan (*sustainability*). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kinerja keuangan yang tidak hanya efisien secara fiskal, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai komitmen terhadap SDGs.

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) mengenalkan teori ini sebagai hubungan antara dua pihak yaitu *principal* (pemilik/pemegang saham) dan *agent* (manajemen/direksi). Dalam konteks perusahaan, pemegang saham (*principal*) mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada manajemen (*agent*) untuk menjalankan operasional. Pada pemerintahan, teori keagenan menganggap masyarakat atau rakyat sebagai *principal* yang memberikan amanah kepada pemerintah daerah sebagai *agent* untuk mengelola sumber daya publik melalui mekanisme pajak. Efektivitas PAD yang tinggi menunjukkan kualitas kemampuan *agent* dalam mencapai target pendapatan yang diinginkan oleh *principal*. Demikian pula dengan rasio belanja modal yang tinggi mencerminkan bahwa *agent* mengutamakan belanja produktif (modal) daripada belanja rutin untuk birokrasi. Dalam perspektif *sustainability* pemerintah daerah sebagai *agent* tidak hanya bertanggung jawab atas aspek finansial tetapi juga dampak terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat yang menjadi *principalnya*.

Teori *Triple Bottom Line*

Konsep *Triple Bottom Line (TBL)* pertama kali diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1994 yang menjelaskan mengenai entitas bisnis yang bersaing perlu menangani isu *people* dan *planet* di samping memaksimalkan *profit*. Pendekatan tersebut akhirnya disebut sebagai *sustainable capitalism*. *TBL* dirumuskan ke dalam tiga pilar utama yang meliputi *profit*, *people* dan *planet*. *Profit* merepresentasikan dimensi ekonomi yang menekankan pada kemampuan organisasi dalam menghasilkan nilai ekonomi dan menjaga keberlangsungan ekonomi secara berkelanjutan. Pilar *People* menggambarkan dimensi sosial yang menekankan pada tanggung jawab organisasi terhadap manusia, baik internal (karyawan) maupun eksternal (masyarakat). Terakhir, Pilar *Planet* merepresentasikan dimensi lingkungan yang menekankan untuk menjaga kelestarian lingkungan

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dalam periode tertentu. Menurut Pundissing & Pagi (2021) kinerja keuangan daerah adalah gambaran atas hasil kerja yang telah dicapai oleh organisasi melalui analisis laporan keuangan. Pramono et al (2025) menyatakan bahwa kinerja keuangan menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dapat mengelola pendapatan dan belanja daerahnya sesuai peraturan yang berlaku dalam satu periode anggaran. Berdasarkan penjelasan tersebut, indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah menggunakan rasio efisiensi yaitu dengan membandingkan total realisasi belanja daerah dan realisasi pendapatan daerah.

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian merupakan salah satu indikator yang menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya secara mandiri, tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat atau provinsi. Menurut Lisiantara & Hidayatuzzahroh (2025) kemandirian pemerintah daerah akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah. Tingkat pembayaran pajak dan retribusi tersebut dapat dijadikan indikator untuk menilai sejauh mana kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Efektivitas PAD

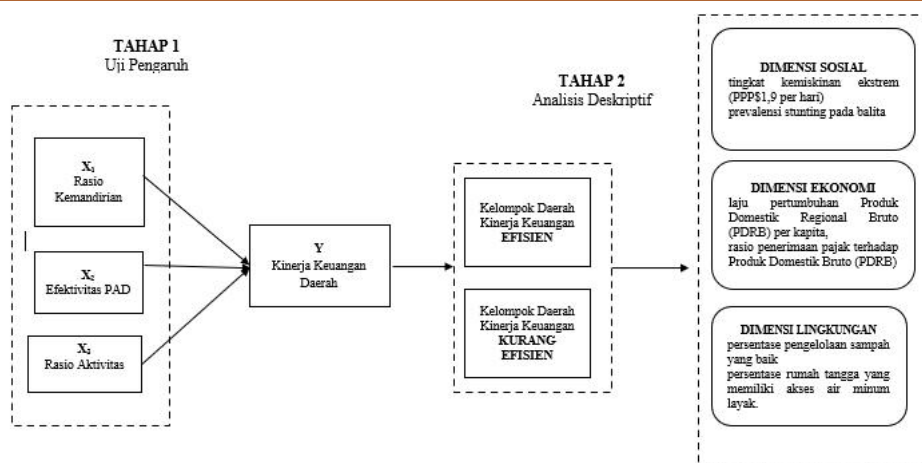
Efektivitas menggambarkan tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan target atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Mahmudi (2010:143) rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Pemerintah Daerah dikatakan berhasil apabila mampu merealisasikan PAD sesuai target yang telah ditetapkan.

Rasio Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memiliki umur manfaat lebih dari satu tahun. Semakin besar proporsi belanja modal, maka semakin tinggi komitmen daerah terhadap investasi pembangunan jangka (Pramesti & Sundari (2025)). Belum ada kriteria baku proporsi belanja modal yang ideal, tetapi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan merekomendasikan agar pemerintah daerah mengalokasikan proporsi belanja modal sebanyak 30% dari total belanja daerah.

Konsep Keberlanjutan (*Sustainability*)

Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) diperkenalkan sebagai tujuan sosial pada konferensi PBB tahun 1972 yang dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan tujuan global untuk membangun masa depan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan pada masa sekarang. Pada penelitian ini, *sustainability* di kuantifikasi melalui kerangka *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang mencakup 17 tujuan dan 169 target yang meliputi aspek pembangunan dengan agenda ketercapaian sampai dengan 2030. Dari 17 tujuan SDGs tersebut dipilih indikator yang akan digunakan untuk mewakili 3 pilar 18 dimensi keberlanjutan yaitu tanpa kemiskinan (SDGs 1) dan tanpa kelaparan (SDGs 2) sebagai indikator dimensi sosial. Tujuan pertumbuhan ekonomi (SDGs 8) dan tujuan penguatan kapasitas pembiayaan pembangunan (SDGs 17) sebagai indikator ekonomi. Tujuan akses air bersih dan sanitasi (SDG 6) dan pengelolaan permukiman dan sampah (SDG 11) sebagai indikator dimensi lingkungan.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Pengaruh Rasio Kemandirian terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Dalam teori keagenan dapat dijelaskan bahwa rakyat sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *agent*, rasio kemandirian mengukur sejauh mana kapabilitas *agent* untuk mengelola sumber daya daerah secara mandiri. Hal tersebut membuat korelasi antara rasio kemandirian dan kinerja keuangan terbentuk, pemerintah daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi menandakan bahwa daerah tersebut mampu membiayai sendiri kegiatan daerahnya. Kondisi tersebut dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah karena belanja dapat disesuaikan dengan kapasitas pendapatan yang dimiliki.

H1: Rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Pengaruh Efektivitas PAD terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Efektivitas PAD merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan oleh *principal* (masyarakat) untuk mengevaluasi kinerja *agent*, melalui perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target yang telah ditetapkan. Jika efektivitas PAD rendah menunjukkan bahwa *agent* belum dapat mengoptimalkan potensi daerah yang ada. Ketika pemerintah daerah mampu mencapai atau melampaui target dalam merealisasikan PAD (Efektivitas PAD tinggi) menunjukkan bahwa daerah tersebut optimal dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang berdampak pada penguatan kapasitas fiskal daerah sehingga mendukung kinerja keuangan daerah.

H2: Efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Pengaruh Rasio Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Dalam teori keagenan, *agent* (pemerintah daerah) diharapkan mengalokasikan anggaran sesuai kepentingan *principal* (masyarakat), yaitu dengan mengalokasikan belanja modal lebih tinggi untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik daripada belanja operasional yang cenderung mementingkan kebutuhan *agent* sendiri. Belanja modal dapat

meningkatkan kinerja keuangan daerah karena dengan alokasi belanja modal yang tinggi untuk pembangunan jalan atau infrastruktur lainnya membuat pelayanan publik lebih optimal.

H3: Rasio belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yaitu kuantitatif dengan menggunakan data yang berbentuk angka untuk mengukur rasio kemandirian, efektivitas PAD, rasio belanja modal dan kinerja keuangan daerah. Data tersebut didapatkan melalui perhitungan angka pada laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2022-2024. Sedangkan untuk analisis dimensi keberlanjutan dan kinerja keuangan daerah dilakukan menggunakan analisis deskriptif komparatif dengan membandingkan daerah dengan kinerja keuangan efisien dan kurang efisien Berdasarkan sumber perolehan datanya, LRA diperoleh dengan cara dokumentasi atau sekunder karena data tersebut telah tersedia dan dipublikasi oleh pemerintah daerah, sehingga peneliti hanya mengumpulkan dan mengolah data yang sudah ada tanpa melakukan pengumpulan data melalui responden. Data untuk menganalisis dimensi keberlanjutan menggunakan laporan SDGs tahun 2024 yang diperoleh melalui permintaan data kepada Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Teknik analisis dilakukan dengan mengelompokkan data dari setiap variabel, kemudian dilakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Data penelitian berbentuk data panel karena menggabungkan data *cross-section* berupa 35 pemerintah kabupaten/kota dan data *time series* selama tiga tahun, yaitu 2022–2024. Analisis regresi dilakukan dengan pendekatan regresi linear berganda atas *pooled* data menggunakan SPSS. Definisi operasional dan perhitungan masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

Simbol	Variable	Formula	Keterangan
Y	Kinerja Keuangan Daerah	$\frac{\text{Total Belanja}}{\text{Total Pendapatan} \times 100\%}$	Semakin rendah rasio, semakin efisien kinerja keuangan daerah
X ₁	Rasio Kemandirian	$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$	Mengukur kemandirian fiskal daerah
X ₂	Efektivitas PAD	$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$	Mengukur kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD sesuai target
X ₃	Rasio Belanja modal	$\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$	Mengukur proporsi belanja produktif/investasi daerah

S	Tingkat kemiskinan ekstrem (PPP\$1,9 per hari)	Diperoleh langsung dari publikasi (tidak dihitung ulang)	Semakin rendah rasio, semakin baik capaian dimensi sosial yang mencerminkan dampak kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat
	Prevalensi stunting pada balita		
E	Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita,	Diperoleh langsung dari publikasi (tidak dihitung ulang)	Semakin tinggi rasio, semakin baik capaian dimensi ekonomi yang mencerminkan dampak kinerja keuangan terhadap perekonomian daerah yang berkelanjutan.
	Rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB)		
L	Persentase pengelolaan sampah yang baik	Diperoleh langsung dari publikasi (tidak dihitung ulang)	Semakin tinggi rasio, semakin baik capaian dimensi lingkungan yang mencerminkan dampak positif kinerja keuangan terhadap keberlanjutan lingkungan.
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak.		

Tabel 1. Definisi Operasional

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Rasio Kemandirian	105	8.73	112.61	28.3272	17.33720
Efektivitas PAD	105	74.23	130.44	103.2610	9.86148

Rasio Belanja Modal	105	.05	22.94	12.0332	3.85136
Kinerja Keuangan Daerah	105	24.08	110.31	100.7312	8.93824

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Variabel rasio kemandirian (X_1) dari 105 data observasi menunjukkan nilai minimum sebesar 8,73% dan nilai maksimum sebesar 112,61%. Nilai rata-rata (*mean*) rasio kemandirian sebesar 28,3272% dengan standar deviasi sebesar 17,337. Rata-rata rasio kemandirian tersebut menunjukkan bahwa secara umum pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
2. Variabel Efektivitas PAD (X_2) menunjukkan nilai minimum sebesar 74,23% dan nilai maksimum sebesar 130,44%. Nilai rata-rata efektivitas PAD sebesar 103,2610% dengan standar deviasi 9,861. Rata-rata nilai efektivitas PAD yang melampaui 100% mengindikasikan bahwa secara umum pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah telah berhasil merealisasikan PAD melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga masuk dalam kategori sangat efektif.
3. Variabel Rasio Belanja modal (X_3) yang diukur dengan rasio belanja modal menunjukkan nilai minimum sebesar 0,05% dan nilai maksimum sebesar 22,94%. Nilai rata-rata rasio belanja modal sebesar 12,0332% dengan standar deviasi 3,851. Rentang nilai yang lebar antara nilai minimum dan maksimum mencerminkan perbedaan prioritas anggaran yang signifikan antar daerah dalam mengalokasikan belanja untuk investasi jangka panjang.
4. Variabel Kinerja Keuangan Daerah (Y) yang diukur menggunakan rasio efisiensi menunjukkan nilai minimum sebesar 24,08% dan nilai maksimum sebesar 110,31%. Nilai rata-rata kinerja keuangan daerah sebesar 100,7312% dengan standar deviasi 8,938. Rata-rata nilai rasio efisiensi yang melampaui 100% mengindikasikan bahwa secara agregat realisasi belanja daerah melebihi total realisasi pendapatan daerah.

Asumsi Klasik

Normalitas

Berdasarkan output SPSS yang disajikan pada tabel, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi Kolmogorov–Smirnov (Asymp. Sig. 2 -tailed) adalah 0,099 lebih besar dari 0,05 ($0,099 > 0,05$), maka nilai residual dalam model regresi ini sudah berdistribusi normal. Dengan demikian asumsi normalitas residual telah terpenuhi.

		Unstandardized Residual
N		102
Normal Parameters	Mean	.0123646
	Std. Deviation	.17519954
	Absolute	.081
Most Extreme Differences	Positive	.068
	Negative	-.081

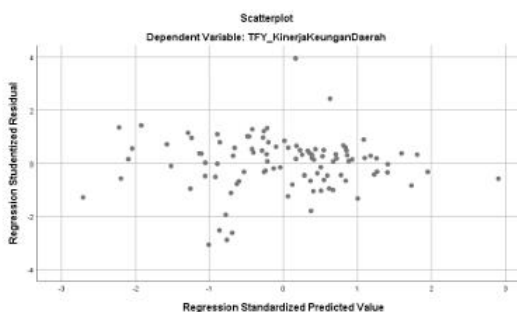
Test Statistic	.081
Asymp. Sig. (2-tailed)	.099 ^c

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas**Multikolinearitas**

	Tolerance	VIF
Constant	-	-
Rasio Kemandirian	.860	1.162
Efektivitas PAD	.926	1.080
Rasio Belanja Modal	.893	1.119
Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah		

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Dari tabel hasil uji multikolinearitas dapat dilihat bahwa nilai toleransi untuk variabel rasio kemandirian $0.860 > 0,10$ dan nilai VIF $1.162 < 10$. Hasil untuk variabel efektivitas PAD nilai toleransi $0.926 > 0,10$ dan nilai VIF $1.080 < 10$. Hasil untuk variabel Rasio Belanja modal $0.893 > 0,10$ dan nilai VIF $1.119 < 10$. Berdasarkan nilai toleransi dan VIF pada seluruh variabel independen, hasil menunjukkan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

Heteroskedastisitas**Gambar 2. Scatterplot**

Berdasarkan gambar terlihat bahwa titik - titik menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Penyebaran titik tersebut tidak membentuk pola tertentu yang teratur seperti pola gelombang, garis lurus horizontal atau melebar lalu menyempit. Selain itu titik juga tidak berkumpul hanya di satu tempat saja misalnya dikiri atau dikanan saja sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel X_1 , X_2 dan X_3 bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Autokolerasi

	Unstandardize d Residual
Test Value	.01800
Cases < Test Value	50
Cases >= Test Value	51
Total Cases	101
Number of Runs	44
Z	-1.499
Asymp. Sig. (2-tailed)	.134

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa setelah dilakukan transformasi data, nilai Asymp Sig. (2-tailed) $0.134 > 0.05$ yang menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi dalam model regresi ini. Dengan demikian model regresi telah memenuhi uji autokorelasi dan dapat dilakukan analisis selanjutnya.

Uji Kesesuaian Model**Koefisien Determinasi (R^2)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.340	.116	.088	.16798

Tabel 5. Hasil Uji R^2

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai Adjusted R^2 sebesar 0.088 yang menunjukkan kemampuan variabel independen yaitu rasio kemandirian, efektivitas PAD, dan rasio belanja modal dalam menjelaskan variabel dependen kinerja keuangan daerah adalah sebesar 8.8% sedangkan 91.2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

Uji F

	Model	F	Sig.
1	Regression	4.230	.007

Tabel 6. Hasil Uji F

Berdasarkan hasil pada tabel tersebut, diperoleh nilai signifikansi $0.007 < 0.05$ yang berarti variabel dependen yaitu rasio kemandirian, efektivitas PAD dan rasio belanja modal secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen kinerja keuangan daerah.

Uji T

	Model	T	Sig.
Constant		3.153	.002
Rasio Kemandirian		-.387	.699

Efektivitas PAD	1.918	.058
Rasio Belanja Modal	-2.330	.022
Dependent Variable:	Kinerja	Keuangan
Daerah		

Tabel 7. Hasil Uji T

1. Berdasarkan hasil regresi pada tabel, variabel independen rasio kemandirian memiliki t hitung $(-0,387) < t$ tabel $(1,984)$ dan nilai signifikansi sebesar $0,699 > 0,05$ maka H_1 ditolak yang berarti variabel rasio kemandirian tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah
2. Berdasarkan hasil regresi pada tabel, variabel independen efektivitas PAD terhadap kinerja keuangan daerah memiliki t hitung $(1,918) < t$ tabel $(1,984)$ dan nilai signifikansi sebesar $0,058 > 0,05$, maka H_2 di tolak yang berarti efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah
3. Berdasarkan hasil regresi pada tabel, variabel independen rasio belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah memiliki nilai signifikansi $0,022 < 0,05$, maka H_3 diterima yang berarti variabel rasio belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Pembahasan

Pengaruh Rasio Kemandirian terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar atau kecilnya rasio kemandirian suatu daerah tidak secara langsung mempengaruhi efisien atau tidaknya pemerintah daerah dalam merealisasikan belanjanya terhadap pendapatan. Kondisi ini dapat disebabkan karena tingginya pendapatan asli daerah belum tentu membuat pemerintah daerah tersebut efisien dalam membelanjakan anggarannya, pendapatan daerah meningkat belanja juga meningkat sehingga terjadi pemborosan anggaran. Selain itu, jika dilihat pada rata – rata rasio kemandirian pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar 28.32% menunjukkan bahwa mayoritas pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat. Hal ini membuat rasio kemandirian belum menjadi faktor utama yang mempengaruhi efisiensi keuangan daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Hidayatuzzahroh & Lisiantara (2025) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Sebaliknya, hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Trisnaningsih & Permatasari (2022) dengan hasil rasio kemandirian berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah

Pengaruh Efektivitas PAD terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah di seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini dapat terjadi karena tingginya efektivitas PAD disebabkan oleh penetapan target yang relatif rendah, sehingga target mudah dicapai, yang tercermin dalam nilai rata – rata efektivitas PAD pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar 103,26% berada diatas 100%

menandakan bahwa daerah telah sangat efektif dalam merealisasikan PAD. Efektivitas PAD belum mencerminkan kontribusi terhadap pendapatan daerah yang dapat menambah ruang fiskal sesungguhnya sehingga belum berdampak terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Santoso (2025) yang menemukan bahwa efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian oleh Choiruddin et al (2023) menemukan hasil yang bertentangan, yaitu efektivitas PAD berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah pada wilayah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Pengaruh Rasio Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah di seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Arah pengaruh yang ditunjukkan oleh koefisien regresi negatif (-0,011) menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio belanja modal maka semakin rendah rasio efisiensi sehingga semakin baik kinerja keuangan daerah. Hasil pengujian secara statistik menunjukkan arah hubungan yang negatif tetapi secara konsep hubungan antara belanja modal dan kinerja keuangan daerah bernilai positif. Sesuai dengan teori keagenan, *agent* (pemerintah daerah) diharapkan mengalokasikan anggaran sesuai kepentingan *principal* (masyarakat), yaitu mengalokasikan belanja modal lebih tinggi daripada belanja operasional yang cenderung mementingkan kebutuhan *agent* sendiri. Belanja modal yang tinggi menunjukkan prioritas pemerintah daerah untuk investasi pembangunan jangka panjang seperti jalan dan infrastruktur lainnya yang mendukung pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. Pengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan ini sejalan dengan penelitian Pramono, et al (2025) dan bertentangan dengan penelitian Mulia & Widiatmoko (2025) yang menemukan bahwa rasio belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.

Analisis kinerja keuangan dengan capaian dimensi keberlanjutan (*sustainability*): sosial, ekonomi, dan lingkungan pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah

Analisis ini dilakukan untuk melihat hubungan antara kinerja keuangan daerah yang digambarkan melalui nilai rata-rata rasio efisiensi selama tahun 2023-2024 dengan capaian pembangunan berkelanjutan yaitu dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nilai rata – rata rasio efisiensi tersebut diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar, kemudian dikelompokkan menjadi dua kelompok yang relatif seimbang yaitu pemerintah daerah dengan kinerja keuangan efisien dan pemerintah daerah dengan kinerja keuangan kurang efisien. Setelah itu, analisis dilakukan menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan rata – rata indikator kelompok daerah.

Hasil pengelompokkan menunjukkan bahwa rata - rata kinerja keuangan tahun 2022 – 2024 pada kelompok kinerja keuangan efisien sebesar 98,16% yang menandakan bahwa total belanja daerahnya tidak melebihi total pendapatan daerahnya. Sedangkan kelompok daerah dengan kinerja keuangan kurang efisien memiliki nilai rata – rata sebesar 103,39% dimana secara keseluruhan daerah tersebut defisit karena total belanja daerahnya melebihi pendapatannya.

Hubungan Kinerja Keuangan dengan Dimensi Sosial

Indeks Dimensi Sosial	Kinerja Keuangan Efisien	Kinerja Keuangan Kurang Efisien
Tingkat kemiskinan ekstrem (PPP\$1,9 per hari)	0,89%	1,27%
Prevalensi stunting pada balita	9,36%	10,14%

Tabel 8. Hasil Analisis Dimensi Sosial

Berdasarkan tabel tersebut, daerah dengan kinerja keuangan efisien memiliki capaian dimensi sosial yang lebih baik dibandingkan dengan daerah dengan kinerja keuangan kurang efisien. Temuan ini sejalan dengan konsep *Triple Bottom Line* pada dimensi *people* yang mencerminkan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dengan kinerja keuangan efisien menunjukkan capaian pada dimensi sosial yang lebih baik, ditunjukkan dengan angka kemiskinan ekstrem dan prevalensi stunting pada balita yang lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa dana publik telah dikelola secara efisien serta dialokasikan pada program – program yang memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Hubungan Kinerja Keuangan dengan Dimensi Ekonomi

Indeks Dimensi Ekonomi	Kinerja Keuangan Efisien	Kinerja Keuangan Kurang Efisien
Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita	5,04%	5,07%
Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	0,85%	0,51%

Tabel 9. Hasil Analisis Dimensi Ekonomi

Berdasarkan tabel tersebut, hasil menunjukkan bahwa pada indikator laju pertumbuhan PDRB per kapita kedua kelompok daerah menunjukkan capaian yang hampir sama yaitu 5,04% untuk kelompok efisien dan 5,07% untuk kelompok kurang efisien. Perbedaan yang sangat sedikit tersebut mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi keuangan daerah tidak secara langsung membedakan kecepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun jika dilihat pada indikator rasio penerimaan pajak terhadap PDRB, daerah dengan kinerja keuangan efisien memiliki nilai rata – rata sebesar 0,85 jauh lebih tinggi dibandingkan daerah kurang efisien hanya mencapai 0,51%. Hal ini menunjukkan bahwa daerah yang efisien secara fiskal juga memiliki kapasitas yang baik dalam mengumpulkan pendapatan dari belanja modal ekonomi masyarakatnya. Meskipun kinerja keuangan daerah efisien atau tidak efisien tidak menunjukkan perbedaan yang berarti terhadap laju

pertumbuhan PDRB per kapita, tetapi kinerja keuangan yang efisien tetap berperan dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak, yang pada akhirnya menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Hubungan Kinerja Keuangan dengan Dimensi Lingkungan

Indeks Dimensi Lingkungan	Kinerja Keuangan Efisien	Kinerja Keuangan Kurang Efisien
Persentase pengelolaan sampah yang baik	65,29%	89,82%
Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak.	84,53%	94,59%

Tabel 9. Hasil Analisis Dimensi Lingkungan

Berdasarkan tabel tersebut, analisis pada dimensi lingkungan menunjukkan pola yang berbeda dari kedua dimensi sebelumnya. Daerah dengan kinerja keuangan kurang efisien menunjukkan capaian dimensi lingkungan yang lebih baik pada kedua indikator. Temuan ini tidak sejalan dengan konsep *Triple Bottom Line* khususnya pada dimensi *Planet*, kinerja keuangan daerah yang efisien memiliki nilai yang berlawanan dengan capaian pembangunan lingkungan yang lebih baik. Hasil tersebut menunjukan bahwa kualitas pengelolaan lingkungan tidak ditentukan oleh tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah, tetapi ada faktor lain seperti kondisi geografis. Jika dilihat pada data, daerah yang masuk dalam kelompok kurang efisien didominasi oleh kawasan perkotaan yang secara historis telah memiliki infrastruktur layanan lingkungan yang lebih mapan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga H_1 ditolak
2. Efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga H_2 ditolak
3. Rasio belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga H_3 diterima
4. Ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah
5. Analisis komparatif menunjukan hasil bahwa pada dimensi sosial, daerah dengan kinerja keuangan efisien menunjukkan capaian yang lebih baik, pada dimensi ekonomi tidak terdapat perbedaan yang signifikan, serta pada dimensi lingkungan daerah dengan kinerja keuangan kurang efisien justru menunjukkan capaian yang lebih baik.

DAFTAR REFERENSI

- Aziza, W. Q., & Sukoharsono, E. G. (2021). Evolusi akuntansi keberlanjutan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(10). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i10.4376>
- Anynda, N. S. & Suwardi Bambang Hermanto. (2020). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. In *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* (Journal-Article Volume 9 Nomor 10). <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3690>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2025). Statistik keuangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Tengah 2023 dan 2024. Diakses dari <https://jateng.bps.go.id/id/publication/2025/11/24/c4a0cdb75a64679aa04a038e/statistik-keuangan-pemerintah-provinsi-dan-kabupaten-kota-se-jawa-tengah-2023-dan-2024.html>
- Borouhaki, M., Ferguson, M., & Olsen, T. L. (2021). Environmental Sustainability Trade-Offs in a Product's Supply Chain. In *Springer Series in Supply Chain Management* (Vol. 10). https://doi.org/10.1007/978-3-030-51957-5_9
- Borgaonkar, A. D., & Marhaba, T. F. (2021). Evaluation of sustainability strategies-a water quantity and quality perspective. In *Handbook of Water Purity and Quality*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821057-4.00011-2>
- Choiruddin, Sari, & Yeyen. (2023). Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, dan Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *BENEFIT: Journal Of Business, Economics, And Finance*, 3(2), 2344–2359. <https://doi.org/10.70437/benefit.v3i1.1298>
- Fardianto, F. (2025, 5 Juni). 32 pemda di Jateng raih WTP, ada temuan pungutan pajak belum disetor. *IDN Times Jateng*. Diakses dari <https://jateng.idntimes.com/news/jawa-tengah/32-pemda-di-jateng-raih-wtp-ada-temuan-pungutan-pajak-belum-disetor-00-l4nr2-1cxx7v/amp>
- Gürses, A., Güneş, K., & Şahin, E. (2021). Environmentally sound textile wet processing. In *Green Chemistry for Sustainable Textiles: Modern Design and Approaches*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-85204-3.00008-7>
- Hidayatuzzahroh, A., & Lisiantara, G. A. (2025). The Influence Of Regional Independence Ratio And Regional Expenditure On Regional Government Financial Performance (Empirical Study On Regency/City Governments In Central Java Province In 2019-2023). In *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3690>
- Hijrianti, Z. L. S., Winarni, D., Amir, & Pramono, H. (2025). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah. In *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* (Vol 9 No 2). <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5353002>
- Insani, A., Rahayu, S., Erwati, M., & Universitas Jambi. (2023). Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. In *Universitas Jambi, Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* (Vol. 6, Issue 1, pp. 109–125). <https://akurasi.unram.ac.id/index.php/akurasi/article/view/343>
- Julianti, H., Agustina, F., & Khoiriyah, Y. (2024). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah, leverage terhadap kinerja keuangan. *Journal of*

Accounting Management Economics and Business (ANALYSIS), 2(2), 141–152.
<https://doi.org/10.56855/analysis.v2i2.1100>

- Johnston, G. (2023). Surveying and sustainability. *Hydro International*, 27(5), 33–3
- Misni Erwati, Sri Rahayu, & Amin Insani. (2021). Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan (Akurasi)*, 6, halaman 95-125.
<https://akurasi.unram.ac.id/index.php/akurasi/article/view/343>
- Mulia, S., 1, & Widiatmoko, J., 2. (2025). Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Periode 2019-2023). In *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*.
https://www.researchgate.net/publication/390762011_DETERMINAN_KINERJA_KEUANGA_N_PEMERINTAH_DAERAH
- Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Saidah, S. L., & Hidayat, M. T. (2025). Pengaruh pembiayaan daerah, ukuran pemerintah daerah dana perimbangan dan belanja bantuan sosial terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya tahun 2014-2023. In *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*. <https://al-haramjournal.id/index.php/EKOMA/article/view/7507>
- Santoso, D. (2023). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Sesudah Covid-19). In *Seminar Nasional Manajemen Dan Call for Papers (SENIMA 10)*.
<https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/senima/article/view/5556/1348>
- Sundari, A. D., & Pramesti, W. (2025). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. In *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*.
<https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/14907>